

**EFEKTIVITAS PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT MELALUI RESES ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Seyva Vanisha Patianfla

NPP. 29.0436

Asdaf Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: Seyvavanisha31@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Many people's aspirations that were conveyed through the recess of the DPRD members of Lahat Regency were not followed up so that the community did not feel the results of the recess activity itself. **Objective:** to determine the factors supporting and inhibiting the effectiveness of the recess activities of the DPRD members of Lahat Regency in absorbing the aspirations of the people in Lahat Regency and the efforts made by the Lahat Regency DPRD. **Method:** This study used descriptive qualitative methods with an inductive approach and analysis of program evaluation according to Peter H. Rossi's Theory. Data collection techniques were carried out by interviewing 12 informants, and documentation. **Result:** The result obtained by the authors in this study indicate that the absorption of community aspirations through the recess of members of the DPRD of Lahat Regency is quite effective but community participation is still very low, both in terms of public knowledge about the implementation of recess of DPRD members and community participation in its implementation. **Conclusion:** Various inhibiting and supporting factors can be an effort to increase the effectiveness of the absorption of community aspirations through the recess of DPRD members. In order to increase the effectiveness of the absorption of people's aspirations, it is recommended that DPRD members are expected to be able to use the recess budget and APBD to the maximum and efficiently for the public interest.

Keywords: Community Aspirations; Recess; DPRD; Lahat District

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Banyak aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses anggota DPRD Kabupaten Lahat tidak ditindaklanjuti sehingga masyarakat tidak merasakan hasil dari kegiatan reses itu sendiri. **Tujuan:** untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat efektivitas kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Lahat dalam menyerap aspirasi masyarakat di Kabupaten Lahat serta upaya yang dilakukan DPRD Kabupaten Lahat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan analisis terhadap evaluasi program menurut Teori Peter H. Rossi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap 12 informan, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses anggota DPRD Kabupaten Lahat sudah cukup efektif namun partisipasi masyarakat masih sangat rendah, baik itu pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan reses anggota DPRD maupun partisipasi

masyarakat dalam penyelenggaraannya. **Kesimpulan:** faktor penghambat dan pendukung diatasi dengan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses anggota DPRD. Guna meningkatkan efektivitas penyerapan aspirasi masyarakat, disarankan agar Anggota DPRD diharapkan mampu menggunakan anggaran reses maupun APBD secara maksimal dan efisien untuk kepentingan publik, Anggota DPRD Kabupaten Lahat diharapkan mampu mempertahankan kinerjanya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Kata kunci: Aspirasi Masyarakat; Reses; DPRD; Kabupaten Lahat

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi yang terjadi di Indonesia pada 1998 menandai adanya banyak perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia seperti Otonomi Daerah. Dalam praktik pelaksanaannya, untuk mewujudkan tujuan Otonomi Daerah tentu saja pemerintah dibantu oleh masyarakat bersinergi membangun daerahnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berwenang pada kekuasaan legislatif, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 149.

Seiring dengan penguatan infrastruktur politik, peningkatan intensitas dan efektivitas komunikasi politik dua arah antara masyarakat dengan lembaga perwakilan rakyat perlu didorong. Dalam menampung segala aspirasi, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 161 Huruf (i) yang berbunyi “maka DPRD menjalankan tugas dengan berkunjung ke masing-masing daerah pemilihannya untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat secara langsung, kunjungan kepada masyarakat ini disebut dengan tugas reses Anggota DPRD.”

Tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peratutran Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain: meningkatkan kualitas pelayanan publik, menyerap aspirasi masyarakat yang nantinya akan dituangkan pada pokok-pokok perencanaan anggota DPRD.

Masa reses merupakan kesempatan emas bagi masyarakat Kabupaten Lahat untuk menyampaikan aspirasi kepada dewan perwakilan. Aspirasi ini berkenaan erat dengan persoalan yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat baik di bidang pembangunan, perekonomian, pemerintahan, dan lain-lain.

Pada hakekatnya, perwakilan rakyat diharuskan mampu mengartikulasikan setiap aspirasi masyarakat, sehingga setiap program atau kebijakan yang dikeluarkan itu merupakan hasil usulan, komunikasi timbal balik dan demokrasi yang baik antara Pemerintah Daerah dan masyarakatnya. Berdasarkan data Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat, jumlah seluruh aspirasi masyarakat tahun 2020 berjumlah 500, namun aspirasi yang ditindaklanjuti hanya berjumlah 150 atau sekitar 30% yang selanjutnya masuk dalam Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) DPRD, kemudian menjadi usulan pada rapat RAPBD yang selanjutnya disesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan efektivitas penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses anggota DPRD di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan ini. Pada 2019, DPRD Kabupaten Lahat menetapkan sebanyak 40 orang dalam susunan pimpinan dan keanggotaan pelaksanaan reses. Masa reses merupakan kesempatan emas bagi masyarakat Kabupaten Lahat untuk menyampaikan aspirasi kepada dewan perwakilan. Aspirasi ini berkenaan erat dengan persoalan yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat baik di bidang pembangunan, perekonomian, pemerintahan, dan lain-lain. Data pada 2019-2020 menunjukkan bahwa banyaknya anggota DPRD yang tidak melaksanakan kegiatan reses sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pada Peraturan DPRD Kabupaten Lahat Nomor 1 tentang Tata Tertib DPRD. Tidak sedikit masyarakat yang menilai bahwa reses hanya sebagai kegiatan formalitas DPRD saja.

Selain itu, perjalanan pembangunan wilayah Kabupaten Lahat tentu dituntut dapat memberikan jawaban dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Lahat. Namun pembangunan wilayah Kabupaten Lahat kurang dirasakan oleh masyarakat misalnya di bidang infrastruktur seperti jalan yang hingga saat ini masih belum juga terealisasi. Dalam menanggapi hal ini, tentunya membutuhkan peran dari DPRD sebagai perwakilan rakyat dalam menyerap aspirasi masyarakat agar menjadi usulan yang akan disampaikan pada rapat penyusunan Rancangan Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (RAPBD) pada sidang paripurna dengan memperhatikan tingkat prioritas yang dibutuhkan.

Pada dasarnya pelaksanaan reses merupakan sarana komunikasi untuk menampung semua aspirasi masyarakat, baik itu masukan, keluhan, maupun kritikan dari masyarakat itu sendiri. Namun partisipasi masyarakat masih sangat rendah, baik itu pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan reses anggota DPRD maupun partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraannya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Rachmat Hendriyanto berjudul Analisis Akuntabilitas Politik Reses, Studi Tentang Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah (Hendriyanto, 2015), Laporan reses tiap anggota masih banyak yang didalamnya memasukkan aspirasi yang bukan kewenangan DPRD provinsi. Selain itu ada 3 persoalan dalam penegakan akuntabilitas politik reses yaitu: Pertama, legislatif dinilai kurang mampu untuk mempengaruhi kebijakan publik yang dibuat pemerintah sesuai dengan kebutuhan rakyat. Kedua, penegakan akuntabilitas politik secara sehat dan bertanggung jawab bisa dilihat dari mutu interaksi dan komunikasi. Ketiga, batasan wewenang yang jelas antara kebijakan publik yang dapat dan tidak dapat diintervensi legislatif.

Penelitian Kurniasih & Rusfiana menemukan bahwa Antusiasme masyarakat terhadap reses pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bandung dinilai cukup baik yang dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang berbondong-bondong mengikut kegiatan reses tersebut dan ikut menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD yang mewakili mereka. (Kurniasih & Rusfiana, 2021)

Penelitian Apriliansyah mengukur tingkat efektivitas berdasarkan Hipotesis (1) Efektivitas pelaksanaan masa reses anggota DPR RI periode 2014-2019 kurang baik apabila $\leq 65\%$. (2) Efektivitas pelaksanaan masa reses anggota DPR RI Ratnasari sebagai anggota DPR RI $> 65\%$ sesuai dengan kriteria yang diharapkan dan sudah efektif. (Apriliansyah, 2019).

Penelitian Gestriadi menemukan bahwa Pelaksanaan reses DPRD Kota Serang belum efektif dibuktikan dengan hasil tanggapan responden, rata-rata tanggapan responden terhadap pelaksanaan reses adalah sebesar 46,3% (Gestriadi, 2015).

Penelitian Kariem & Ishmatuddin yang berjudul *Analysis of the Legislative Function of Banyuasin Regency Legislative Council Members During the Recess Period* (Kariem & Ishmatuddin, 2020) menemukan bahwasannya proses mengungkapkan aspirasi pada masa reses ini menunjukkan peningkatan partisipasi dalam berdemokrasi tetapi kondisi geografis desa menantang dijangkau oleh kendaraan dan terdiri dari wilayah perairan. Masalah ini dapat mendorong anggota dewan untuk lebih fokus pada mengumpulkan aspirasi secara kolektif. Pelaksanaan masa reses cukup bermanfaat untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat di legislatif. Keefektifan tersebut ditunjukkan dengan antusias masyarakat dalam partisipasi politik, yaitu menyampaikan kebutuhan dasarnya kepada wakil rakyat melalui forum reses.

Penelitian Azzahri, Andri dan Adianto menemukan bahwa Salah satu kriteria pengukuran efektivitas penggunaan dana reses yaitu kriteria ketepatan dibuktikan koordinasi yang dilakukan antara anggota dewan dengan pihak kecamatan yang tidak saling terhubung dalam melaksanakan kegiatan reses menyebabkan penggunaan dana reses belum efektif. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor penghambat kegiatan reses yaitu kurangnya pendidikan politik masyarakat dalam memahami dan mengikuti kegiatan anggota dewan, kegiatan reses hanya berupa rutinitas dan seremonial anggota dewan serta terbatasnya anggaran untuk merealisasikan hasil reses berupa aspirasi masyarakat yang diterima anggota dewan saat melakukan kegiatan reses. (Azzahri, Andri & Adianto, 2021).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana lokasi penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu teori yang digunakan oleh penelitian ini yaitu menggunakan teori dari Peter H. Rossi (Rossi, 2019) dan dari segi tujuan penelitian pun berbeda dengan penelitian Rachmat Hendriyanto dimana penelitian yang dilakukan penulis untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam efektivitas penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses anggota DPRD.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat efektivitas kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Lahat dalam menyerap aspirasi masyarakat di Kabupaten Lahat serta upaya yang dilakukan DPRD Kabupaten Lahat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif dan menganalisis data menggunakan pendapat Peter H. Rossi (Rossi, 2019). Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara terhadap 12 orang informan yang terdiri dari Unsur pimpinan DPRD Kabupaten Lahat (Ketua DPRD, Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2), Sekretariat Dewan Kabupaten Lahat (Sekretaris, Kabag dan Kasubag), Anggota DPRD Kabupaten Lahat (Dapil I, Dapil II, Dapil III, Dapil IV, Dapil V) dan masyarakat di daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Lahat (Aparatur kecamatan, aparat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat). Adapun analisisnya menggunakan teori evaluasi

program dari Peter H. Rossi yang terdiri dari lima dimensi yaitu kebutuhan program, teori dan desain, implementasi dan penyampaian layanannya, hasil dan dampak serta biaya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis efektivitas penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses anggota DPRD Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan menggunakan pendapat dari Peter H. Rossi yang terdiri dari lima dimensi yaitu kebutuhan program, teori dan desain, implementasi dan penyampaian layanannya, hasil dan dampak serta biaya. Faktor pendukung Efektivitas Penyerapan Aspirasi Masyarakat dianalisis berdasarkan kelima dimensi menurut Peter H. Rossi adalah sebagai berikut :

3.1 Kebutuhan Program

Dimensi kebutuhan program menurut Rossi, melihat kondisi sosial apa yang menjadi permasalahan dan implikasinya terhadap cara-cara yang mungkin terjadi untuk ditangani secara efektif. Dengan melihat langsung kondisi sosial yang ada, maka perlu juga mengetahui kebutuhan masyarakat dalam hal ini aspirasi masyarakat secara langsung.

Setelah melihat permasalahan langsung di lapangan, kemudian dilakukan penilaian untuk memeriksa apakah program tersebut responsif terhadap kebutuhan di lapangan saat ini dan memberikan panduan untuk perbaikan selanjutnya. Dalam hal ini dengan DPRD melihat langsung kondisi lapangan serta mendengar langsung aspirasi dari masyarakat akan DPRD dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat daerah tersebut.

3.2 Teori dan Desain Program

Konsep ini membahas mengenai konseptualisasi program yang bertujuan untuk ketepatan sasaran program. Dalam mempersiapkan dan melaksanakan suatu program dibutuhkan suatu koordinasi antar pihak. Pelaksanaan kegiatan reses tidak hanya dilakukan oleh anggota DPRD saja tetapi juga dari berbagai elemen baik pemerintah daerah ataupun tokoh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, mulai dari tahap persiapan hingga tahap pelaporan aspirasi hasil reses, DPRD Kabupaten Lahat perlu berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat.

3.3 Proses Program

Dalam pembahasan evaluasi program menurut Rossi melihat bahwa proses program merupakan unsur penting karena melibatkan pertanyaan tentang operasi program, implementasi, penyampaian layanan, dan cara penerima merasakan layanan program dengan proses evaluasi menyelidiki seberapa baik program beroperasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan tentunya ada yang menjadi faktor penghambat sehingga diperlukan evaluasi untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat dan bagaimana solusinya.

3.4 Dampak Program

Dalam evaluasi program, Rossi mengemukakan bahwa suatu program tidak lepas dari dampak atau target yang dihasilkan. Namun, kesulitan dalam menilai dampak suatu program adalah biasanya hasil juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak terkait dengan program. Menurut konsep evaluasi program menurut Rossi pada dimensi dampak program yang pada penelitian kali ini adalah kegiatan reses, penulis mempunyai pendapat bahwa hasil dari reses yaitu

kebijakan yang berasal dari aspirasi masyarakat juga dipengaruhi oleh unsur lain seperti penyingkiran aspirasi berdasarkan skala prioritas.

3.5 Efisiensi Program

Hal yang dibahas dalam dimensi efisiensi program adalah tentang biaya program dan efektivitas biaya. Sumber daya untuk program sosial dinilai terbatas sehingga capaian kinerja juga harus dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Pengeluaran biaya hanya dapat digunakan untuk tujuan sebagaimana yang tersedia dalam anggaran sekretariat DPRD. Dana yang dianggarkan harus digunakan sesuai dengan tujuannya secara efisien.

Sehingga dari kelima dimensi yang ada tersebut dapat ditentukan faktor pendukung yang mempengaruhi efektivitas penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses anggota DPRD yaitu :

1. Adanya tuntutan atau aspirasi masyarakat
 aspirasi yang telah disampaikan masyarakat kepada anggota DPRD tidak semuanya dapat ditindak lanjuti. Aspirasi-aspirasi ini akan dipilah berdasarkan skala prioritas, barulah disampaikan dalam sidang. Berdasarkan data laporan reses yang diterima penulis, terdapat sebanyak 160 aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat pada Masa Persidangan I Tahun 2021 hingga Masa Persidangan III tahun 2021 pada Daerah Pemilihan (Dapil) IV. Sebanyak 92 aspirasi yang selanjutnya diusulkan ke dalam program pada APBD Kabupaten Lahat Tahun 2022.
2. Adanya peraturan daerah yang menjadi jawaban dari aspirasi masyarakat
 Ditambahkannya Raperda adalah rancangan perda yang penting dan *urgent* untuk segera diundangkan. Karena, perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Raperda-raperda yang dikeluarkan merupakan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan organisasi pemerintah daerah. Adanya Raperda tersebut membuktikan bahwa aspirasi yang selama ini disampaikan oleh masyarakat mampu ditindaklanjuti. Hal ini memberikan dampak positif kepada DPRD berupa kepercayaan dari masyarakat atas tugas dan kewajiban DPRD sebagai wakil rakyat.
3. Sarana dan prasarana
 Pelaksanaan reses oleh anggota DPRD sangat didukung oleh sarana berupa fasilitas kerja yang memadai. DPRD Kabupaten Lahat telah memiliki sebuah gedung representatif yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti ruang rapat sidang, ruang rapat komisi dan ruang rapat fraksi yang dilengkapi ruang perpustakaan dari ruang data, serta perlengkapan sidang yang cukup lengkap. Berikut adalah tabel sarana dan prasarana yang ada di sekretariat DPRD Kabupaten Lahat

Tabel 3.1
 Sarana Prasarana Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat

No	Nama Barang	Jumlah (dalam bidang/unit/buah)	
1	Tanah	1	Unit
2	Peralatan dan Mesin	2146	Unit
3	Gedung	2	Unit
4	Ruang Rapat	4	Bidang
5	Jalan, irigasi dan Jaringan	2	Buah
6	Aset Tetap Lainnya	503	Buah

4. Adanya penjadwalan dan persiapan masa reses

Tahun persidangan dalam DPRD Kabupaten Lahat dimulai sejak pelantikan DPRD pada 26 Agustus dan berakhir pada 26 Agustus berikutnya dan dibagi menjadi tiga masa persidangan meliputi masa rapat dan masa reses. Adanya penjadwalan dan persiapan masa reses ini memudahkan anggota DPRD untuk melakukan tugasnya dan fokus dengan tujuan kegiatan yaitu menyerap aspirasi masyarakat.

Adapun faktor penghambat efektivitas penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses anggota DPRD Kabupaten Lahat yaitu :

1. Proses Program (Lokasi yang sulit dijangkau)

Tidak sedikit daerah terpencil yang belum menjadi tujuan pelaksanaan kegiatan reses akibat sulitnya akses menuju suatu daerah terpencil. Kondisi jalan yang rusak sebanyak 24,77% dan rusak berat sebanyak 20,60% (sumber: BPS Kabupaten Lahat 2021). Hal tersebut menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan reses oleh DPRD sehingga mengakibatkan banyak aspirasi masyarakat dari daerah terpencil atau pedesaan tidak tersalurkan, sedangkan daerah pedesaan merupakan daerah yang sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah, karena banyak kasus-kasus atau masih banyaknya pembangunan yang tidak merata

2. Tingkat partisipasi masyarakat yang masih minim

Tingkat partisipasi masyarakat dalam hal ini dimaksud sebagai partisipasi masyarakat dalam membantu proses pembangunan dan realisasi dari aspirasi masyarakat itu sendiri. Masih banyak masyarakat yang masih belum menyadari pentingnya reses.

3. Kurangnya pendidikan politik masyarakat

Terkadang beberapa dari masyarakat tidak mengerti dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini reses anggota DPRD Kabupaten Lahat. Banyak dari masyarakat di desa-desa tidak mengetahui esensi sesungguhnya kegiatan reses.

4. Keterbatasan anggaran

Aspirasi yang telah ditampung oleh anggota DPRD sangat banyak sehingga tidak semua aspirasi masyarakat dapat tertampung di APBD yang menyebabkan beberapa dari aspirasi masyarakat tidak terwujud secara keseluruhan.

5. Keterbatasan waktu

Memanfaatkan waktu yang relatif singkat untuk dapat berkomunikasi dan memperoleh hasil dari pelaksanaan reses tersebut, minimal keluhan masyarakat akan kebutuhannya yang kemudian dapat di jadikan bahan untuk membuat kebijakan bersama eksekutif untuk menanggulangi permasalahan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat setempat.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses anggota DPRD ini merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk dapat menyalurkan aspirasinya. Penulis menemukan temuan penting yakni banyak aspirasi masyarakat yang tidak ditindaklanjuti. Penelitian ini berbeda dari penelitian milik Rachmat Hendriyanto dimana penelitian tersebut menggunakan teori akuntabilitas politik (Hendriyanto, 2015) teori ini berbeda dengan teori yang dilakukan dalam penelitian penulis yang menggunakan teori evaluasi program.

Penelitian Kurniasih dan Rusfiana bertujuan untuk mengetahui fungsi reses dari anggota DPRD dalam mengartikulasikan setiap aspirasi (Kurniasih & Rusfiana, 2021) sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam mengukur sejauh apa efektivitas penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses anggota DPRD.

Apriliansyah melakukan penelitian dengan menganalisis efektivitas pelaksanaan masa reses anggota DPR RI periode 2014-2019 dengan menyebarkan kuisioner dan menyajikan laporan yang dapat terukur secara statistik yang valid (Apriliansyah, 2019) sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis melakukan analisis hanya dengan wawancara dan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan.

Penelitian Septian Gestriadi melakukan analisis dengan menggunakan angket dimana tanggapan responden dapat terukur secara statistik (Gestriadi, 2015) sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti melakukan analisis secara deskriptif saja.

Teori yang digunakan oleh Kariem & Ishmatuddin menggunakan teori legislasi langsung (Kariem & Ishmatuddin, 2020) sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan teori evaluasi program yang digunakan untuk mengukur efektivitas penyerapan aspirasi masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa efektivitas penyerapan aspirasi melalui reses anggota DPRD Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan sudah cukup efektif, namun tentunya masih ada faktor penghambat yang harus di minimalisir agar tingkat efektivitasnya semakin baik. Guna meningkatkan efektivitas penyerapan aspirasi melalui reses anggota DPRD ini, disarankan agar anggota DPRD diharapkan mampu menggunakan anggaran reses maupun APBD secara maksimal dan efisien untuk kepentingan publik, Anggota DPRD Kabupaten Lahat diharapkan mampu mempertahankan kinerjanya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada DPRD Kabupaten Lahat sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Peter H. Rossi.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan efektivitas penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses anggota DPRD untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Lahat beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kabupaten Lahat. *Kabupaten Lahat Dalam Angka 2018*. Kabupaten Lahat, 2021.
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed (Edisi Ketiga)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- Creswell, John W., and J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Fifth. California: SAGE, 2018.

Denzin, Norman K., and Yvona S. Lincoln. *The Sage Handbook Qualitative Research*. Vol. 195. California: SAGE, 2018.

Flick, Uwe. *Qualitative Data Analysis. The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis*. London: SAGE, 2014.

Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Vol. 148. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Vol. 148. USA: SAGE, 2014.

Rossi, Peter H., Mark W. Lipsey, and Gary T. Henry. *Evaluation: A Systematic Approach*. Eighth. California: SAGE, 2019.

Siyoto, Sandu & Ali Sodi. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Simangunsong, Fernandes. *Metode Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta, 2017.

